

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Kesejahteraan suatu negara berdasarkan perkembangan ekonomi serta sosial dengan memperdulikan terhadap peningkatan kapasitas masyarakatnya (sumber daya manusia), sehingga tercipta *human capital* yang terampil, kreatif dan produktif guna menyokong pembangunan negara. Untuk melihat potensi yang dimiliki sumber daya manusia dalam negara tersebut diperlukan suatu metode dan alat guna melihat pertumbuhan kapabilitas dari masyarakatnya. Hadirlah Indeks Pembangunan Manusia (IPM) untuk menjawab permasalahan tersebut, disini Indeks Pembangunan Manusia sebagai alat untuk mengukur untuk melihat tingkat pembangunan kualitas masyarakat dalam suatu negara ataupun wilayah regional dalam negara tersebut.

Peneliti memilih melakukan penelitian terhadap Indeks Pembangunan Manusia ini karena melihat potensi yang besar pada sumber daya manusia yang dimiliki oleh Indonesia. Dengan memiliki modal utama pada jumlah penduduk yang berada pada usia produktif serta dalam rangka menyongsong bonus demografi yang akan dialami oleh Indonesia pada beberapa tahun kedepan. Dengan latar belakang itulah peneliti melihat beberapa variabel yang diharapkan memiliki keterkaitan dengan Indeks Pembangunan Manusia, dan variabel independen yang dipilih adalah Belanja Daerah (Provinsi), Produk Domestik Regional Bruto, serta selanjutnya Jumlah Penduduk Miskin, dan setiap variabel itu dilihat dari tingkat daerah yang mana ada 34 Provinsi yang dimiliki oleh Indonesia.

Agenda yang memiliki tujuan untuk pembangunan manusia tidak bisa hadir secara tiba-tiba, oleh karena itu peneliti mencoba melihatnya dari sudut pandang pemerintahan terkait dalam hal ini dipilih pemerintah daerah (provinsi) karena perlunya analisis yang dimulai dari tingkat yang dekat dalam hal regional tapi tetap dapat dilihat dalam skala nasional sehingga dipilihlah data belanja daerah dari pemerintah daerah/ provinsi. Belanja daerah adalah perwujudan kebijakan yang diharapkan oleh pemerintah daerah terlaksana di wilayah pemerintahan mereka, sehingga belanja daerah akan menjadi panduan utama dalam kita melihat peran dan harapan yang dilihat pemerintah daerah kepada masyarakatnya. Karena peneliti memiliki keyakinan suatu pertubuhan harus diawali dari tingkat yang paling dasar

karena produk dari pertumbuhan tersebut akan sangat kontekstual dan sejalan dengan potensi daerah tersebut, sehingga diharapkan dengan proses perkembangan yang selaras dan kontekstual itulah yang nantinya akan membuat berjalan secara berkelanjutan. Hadirnya belanja daerah yang sesuai dengan potensi tersebut akan memberikan pertumbuhan ekonomi daerah yang digambarkan dengan parameter Produk Domestik Regional Bruto (PDRB). Dengan mendapatkan gambaran atas sejumlah nilai tambah dari barang serta jasa yang diproduksi dari keseluruhan unit usaha pada suatu wilayah dengan menggunakan PDRB, peneliti ingin melihat bagaimana pertumbuhan tersebut memiliki keterkaitan terhadap peningkatan kualitas sumber daya manusia pada daerah tersebut.

Indeks Pembangunan Manusia dirancang untuk memperlihatkan bahwa pengetahuan & kemampuan manusia haruslah menjadi variabel yang berkontribusi dalam pembangunan suatu negara. Indeks Pembangunan Manusia menggunakan tiga poin parameter yang digunakan untuk melihat keberhasilan suatu negara, yaitu : variabel kesehatan (berdasarkan harapan hidup kelahiran , angka harapan hidup), variabel pengetahuan/ pendidikan (tingkat pendidikan, angka melek aksara) & variabel standar hidup yang layak (kemampuan beli & penghasilan), dengan tiga variabel tersebut sebenarnya belum bisa sebagai indikator pembangunan manusia secara holistik, tetapi dapat digunakan untuk memvisualisasikan gambaran besar terhadap kerumitan dalam menghitung kemajuan sumber daya manusia dari penghasilan serta kesejahteraan tersebut (UNDP, 1990).

Indeks Pembangunan Manusia (IPM) pada dasarnya tidak pernah mencoba untuk menggambarkan banyak hal yang terjadi dalam suatu sistem perekonomian, melainkan lebih kepada bagaimana yang sering disebutkan untuk menggambarkan terhadap kualitas hidup dari sumber daya manusia berbeda jika dibandingkan dengan PDB. Dengan demikian Indeks Pembangunan Manusia lebih mengarah ke kemungkinan dari kejadian – kejadian signifikan yang dialami manusia, sehingga lebih dari sekedar nilai suatu barang yang dibeli ataupun dijual. Angka kematian yang menurun, pelayanan kesehatan yang meningkat, angka pengenyam sekolah formal beserta tingkat pendidikan yang bertumbuh dan variabel lain atas kebutuhan dasar manusia tersebut digabungkan menjadi format agregat yang kolektif, dan Indeks Pembangunan Manusia mencoba menjelaskan hal tersebut. Adanya pemberitahuan dari UNDP di tahun 1990 tentang pembaharuan Indeks Pembangunan Manusia, dengan menggunakan angka konkrit untuk perbedaan pencapaian suatu negara,

sehingga dapat diukur lebih transparan dan relevan dengan keadaan setempat, hal itu disambut baik oleh banyak pihak. Adanya fakta tentang pemberitaan yang menyebutkan Indeks Pembangunan Manusia bisa berlawanan dengan angka dalam PDB dengan berdasarkan pada beberapa indikator yang lebih rinci dalam tabel aspek-aspek tertentu dari pembangunan manusia, itu seperti yang telah di prediksi oleh Mahbub ul Haq, peneliti dari United Nations Development Progrmme.

Pendekatan dari Indeks Pembangunan Manusia seperti memberitahukan bahwa tujuan dari pembangunan lebih berarti daripada pertumbuhan suatu ekonomi. Karena disana memberi perhatian terhadap suatu proses tentang bagaimana fokus tujuan terhadap fundamental pembangunan sumber daya manusia akan selaras dengan hasil dan dampak positif dalam pertumbuhan ekonomi. Sebaliknya, aksi-aksi percepatan pertumbuhan perekonomian tanpa memiliki dasar pembangunan manusia akan memberikan efek semu dan rapuh untuk pembangunan yang berkelanjutan, karena sumber daya manusia hanya menjadi objek dalam prosesnya bukan sebagai subjek yang turut dikembangkan dalam program pembangunan. Pentingnya memiliki keinginan menciptakan pembangunan yang berkelanjutan dengan mendistribusikan sumber daya secara adil dan sadar akan batasan-batasan sosial dan alam menjadikan peluang pengembangan manusia yang sinergis untuk generasi dimasa depan. Meskipun adanya indikator/ komponen pendapatan yang juga berperan dalam Indeks Pembangunan Manusia, itu hanya sebagai gambaran sumber materil yang digunakan untuk kemampuan dasar manusia dalam memperluas kesempatan. Dengan adanya dua kemampuan (akses akan kehidupan yang sehat dan mendapatkan pendidikan) menjadi komponen yang sangat penting sehingga sejak awal mulanya telah ditetapkan menjadi tolak ukur dasar dari Indeks Pembangunan Manusia. Berbeda halnya dengan pendapatan ataupun pertumbuhan ekonomi, keduanya bukan hanya suatu media/ sarana tapi juga sebagai tujuan itu sendiri. Selanjutnya melihat permasalahan tentang jumlah penduduk miskin, peniliti ingin mencari tahu seperti apa, faktor itu dapat memberikan dampak kepada pembangunan manusia di Indonesia. Penduduk miskin yang senantiasa dikaitkan dengan ketidakmampuan mereka dalam mendapatkan akses sumber daya pendukung untuk pemenuhan dasar hidup mereka apakah akan memberikan dampak langsung kepada proses pembangunan sumber daya manusia pada 34 Provinsi di Indonesia.

Dalam pembangunan manusia, kapabilitas/ kemampuan, keterwakilan serta nilai sirkular tidak dapat dipisahkan dalam jendela berpikir kita terkait pembangunan

manusia dalam ranah keberlangsungan kehidupan di bumi (sosial & lingkungan). Kita tidak bisa serta-merta memberikan opini bahwa dengan terwujudnya pembangunan manusia yang luas dapat seketika mengurangi beban kehidupan bagi bumi. Indeks Pembangunan Manusia beberapa kali memberikan bukti yang berkebalikan, beberapa negara yang memiliki tingkat Indeks Pembangunan Manusia yang tinggi cenderung menghasilkan tekanan lebih banyak dengan skala yang lebih besar bagi kehidupan.

Dari tiga indikator (pendidikan, kesehatan & standar hidup layak). Kemajuan pendidikan personal berkaitan dengan kenaikan produktivitas yang berdampak pada peningkatan pendapatan. Hadirnya variabel kesehatan dapat memperlihatkan partisipasi serta optimasi kinerja seseorang. Dengan memiliki sumber daya manusia yang sehat akan berdampak pada kenaikan pendidikan dan pengembangan potensi personal yang kelak berkontribusi pada pertumbuhan ekonomi serta meningkatkan pendapatan (Hidaya, 2014)

Ada tiga peranan pemerintah dalam peningkatan perekonomian, menurut Guritno (2001), yaitu :

1. Stabilisasi, pemerintah sebagai penyeimbang untuk menjaga sektor ekonomi dapat berjalan dengan aman & normal
2. Distribusi, pemerintah merancang beragam instrumen & kebijakan guna efisiensi serta optimalisasi pengalokasian komoditas & sumber daya ekonomi untuk dimanfaatkan oleh masyarakat.
3. Alokasi, pemerintah merencanakan serta memutuskan pengelolaan sumber dayanya untuk dimanfaatkan untuk pembuatan produk individu, pemerintah menetapkan berbagai keperluan yang dibutuhkan masyarakat, serta menakar banyaknya yang harus disediakan oleh pemerintah dan berapa besaran yang disediakan perusahaan. Langkah ini perlu dilakukan karena tiap kepemilikan sumber daya pemerintah memiliki keterbatasan.

Hasil dalam suatu pertumbuhan perekonomian suatu negara akan berkaitan dengan *human capital* atau sumber daya manusia yang mereka miliki, maka karena itu untuk memberikan efek pacu pertumbuhan ekonomi perlu adanya perlakuan peningkatan kapabilitas dalam aspek pembangunan manusia, tidak hanya secara nasional tapi juga dari tingkat regional. Hal diatas telah disampaikan dalam teori Cobb-Douglas, dari sana bisa kita lihat bahwa peran pemerintah daerah sangatlah penting apalagi dengan sistem otonomi saat ini pihak regional diharuskan untuk

berperan aktif untuk peningkatan potensi lokal mereka, dalam hal ini tak hanya komoditas melainkan juga sumber daya manusia nya.

Dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Pasal 1 tentang Otonomi Daerah, telah mengatur sumber keuangan pemerintah daerah dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah. Hadirnya peraturan tentang otonomi daerah membuat pemerintah daerah mempunyai wewenang untuk mengadakan pendapatan serta dapat menentukan pengalokasiannya demi keperluan pembangunan di daerah secara mandiri serta sesuai dengan harapan komunitas setempat untuk kesejahteraan masyarakat. Dengan menggunakan APBD pemerintah daerah dapat menggunakannya untuk pembiayaan pembangunan di bidang yang terhubung dengan pembangunan manusia.

Dalam pembangunan manusia, ada banyak aspek yang mempengaruhi optimasi proses tersebut salah satunya adalah kemiskinan yang sering kali menjadi penghambat serius. Karena dari kemiskinan akan memiliki dampak turunan lainnya seperti kesehatan ataupun juga dalam hal pendidikan. Ketidakmampuan memenuhi kebutuhan tersebut menciptakan jarak/ *gap* yang membuat program pembangunan sumber daya manusia di pemerintah daerah mengalami kesulitan dalam prosesnya. Melalui kacamata ekonomi, faktor kemiskinan membuat terciptanya sumber daya manusia yang tidak optimal, dan itu menimbulkan efek samping lainnya seperti pendapatan masyarakat yang rendah karena keterbatasan kemampuan, dan ini menjadi lingkaran setan dalam progres pembangunan manusia.

Sering disebut sebagai negara agraris Indonesia memiliki beragam potensi & komoditas di setiap daerah, ini membuat adanya perbedaan dalam pengalokasian yang dilihat dari jumlah anggaran yang mereka sediakan. Pendanaan yang diberikan berasal dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN), Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Provinsi & Kabupaten/ Kota, serta beberapa pinjaman dari luar negeri serta basis pendanaan lainnya.

Dalam laporan Human Development Report 2020 dari United Nations Development Programme (UNDP). Indonesia masuk dalam klasifikasi *High Human Development* bersama beberapa negara ASEAN lainnya, bersama Thailand, Philippines serta Vietnam.

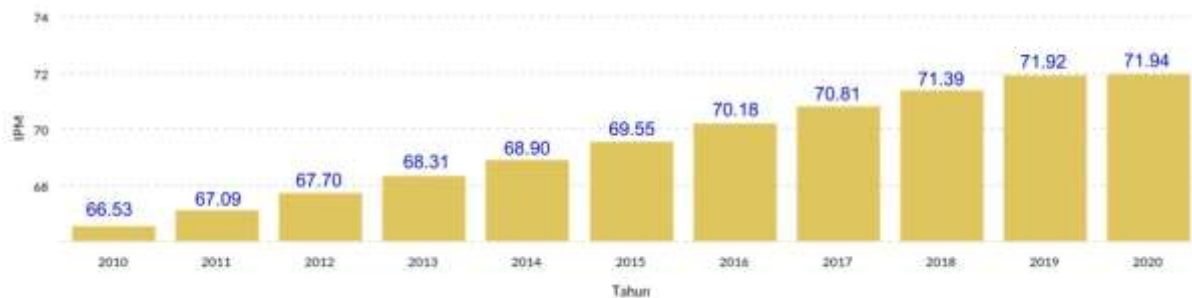
Tabel 1. 1 Tren Indeks Pembangunan Manusia Beberapa Negara Tahun 2019

HDI RANK	Country	HDI Value 2019	Change in HDI Rank	Average Annual HDI Growth (%) 2010-2019
74	Mexico	0.779	+4	0.45
74	Ukraine	0.779	-1	0.35
79	Thailand	0.777	+8	0.79
84	Brazil	0.765	-2	0.57
88	Azerbaijan	0.756	+1	0.45
106	Uzbekistan	0.720	+4	0.82
107	Indonesia	0.718	+6	0.86
107	Philippines	0.718	+3	0.76
104	South Africa	0.709	-2	0.73
117	Vietnam	0.704	+1	0.70

Sumber : Human Development Report 2020, UNDP

Dari tabel tren Indeks Pembangunan Manusia tersebut, terlihat Indonesia di tahun 2019 mendapatkan tren positif dengan angka 0.718 dengan rata-rata pertumbuhan sebesar 0.86 per tahun selama rentang tahun 2010-2019, dengan kenaikan 6 ranking dari sebelumnya menunjukkan hasil progresifitas yang cukup baik meskipun masih dibawah Thailand yang telah meningkat secara agresif ke posisi 79 dengan nilai IPM sebesar 0.777 di tahun yang sama, tapi secara keseluruhan dari tabel berikut terlihat bahwa negara-negara ASEAN dalam proses pertumbuhan yang positif pada tahun 2019.

Selanjutnya kita akan melihat lebih detail pertumbuhan Indeks Pembangunan Manusia Indonesia pada lima tahun terakhir dari tahun 2016-2020. Dengan kondisi badai pandemi Covid-19 yang dimulai pada 2020 membuat seluruh belahan dunia merasakan dampak di berbagai sektor kehidupan bermasyarakat. Karena Covid merupakan isu kesehatan yang mana salah satu kebutuhan fundamental dalam pemenuhan kehidupan, sehingga memberikan efek domino ke berbagai sektor seperti pendidikan, perdagangan, pariwisata dan lini sosial ekonomi lainnya.



Gambar 1. 1 Indeks Pembangunan Manusia Indonesia 2010-2020

Sumber : BPS

Di tahun 2020, Indeks Pembangunan Manusia Indonesia di angka 71.94 (bertumbuh 0.03% dari tahun 2019) dengan perbandingan di tahun sebelumnya sebesar 0.74%. Hasil ini membuat Indonesia bertahan dalam posisi *High Human Development*. Dengan rata-rata pertumbuhan IPM rentang waktu 2010-2019 sebanyak 0.74 %, kini dengan adanya perlambatan ekstrim di tahun 2020 membuat rata-rata pertumbuhan IPM tahun 2010-2020 sebesar 0.78 % per tahun.

Berdasarkan info grafis Indeks Pembangunan Manusia tersebut dapat menggambarkan sebenarnya seara garis besar Indonesia selalu mengalami kenaikan dari tahun ke tahun. Tapi tren tersebut mulai terancam pada 2020, dan disinilah diperlukan *treatment* langsung dari pemerintah daerah dan pusat untuk menyiapkan rangkaian mitigasi ekonomi dalam keadaan pandemi. Dan ada beberapa pintu masuk yang bisa dimanfaatkan untuk memberikan dorongan ekonomi nasional melalui peran beritut : adanya kebijakan alokasi anggaran dalam sektor kesehatan serta pendidikan, karena dimasa pandemi ini kita semua seakan tersadar bahwa kesehatan adalah modal dan pondasi utama sebelum melanjutkan ke bidang lainnya, dengan memiliki penguatan dalam kesehatan membuat peningkatan disektor lain akan menjadi lebih efisien dalam kesehatan ini bisa berupa peningkatan layanan kesehatan mealui inovasi teknologi ataupun protokol kesehatan yang jelas dan mudah dipahami bagi masyarakatnya. Setelah modal kesehatan telah dicapai selanjutnya bidang pendidikan menjadi sektor yang perlu diberikan perhatian dengan model edukasi jarak jauh saat ini penting untuk memastikan ketersediaan sarana pendukung lainnya seperti akses listrik, internet serta media alternatif pembelajaran lainnya sehingga setiap murid mendapatkan kesempatan yang sama dalam pemenuhan pengembangan diri. Kedua sektor itu dapat dilakukan dengan peningkatan kesejahteraan melalui mekanisme PDRB riil .

Peran pemerintah tersebut menjadi hal yang diperlukan dalam upaya peningkatan pembangunan manusia di Indonesia yang tidak hanya berdampak tapi juga berkelanjutan (sirkular), dan tentunya semua itu harus dilihat dari hal yang kontekstual sesuai potensi tiap daerah sehingga aksi dan hasil yang diterima bisa lebih efisien.

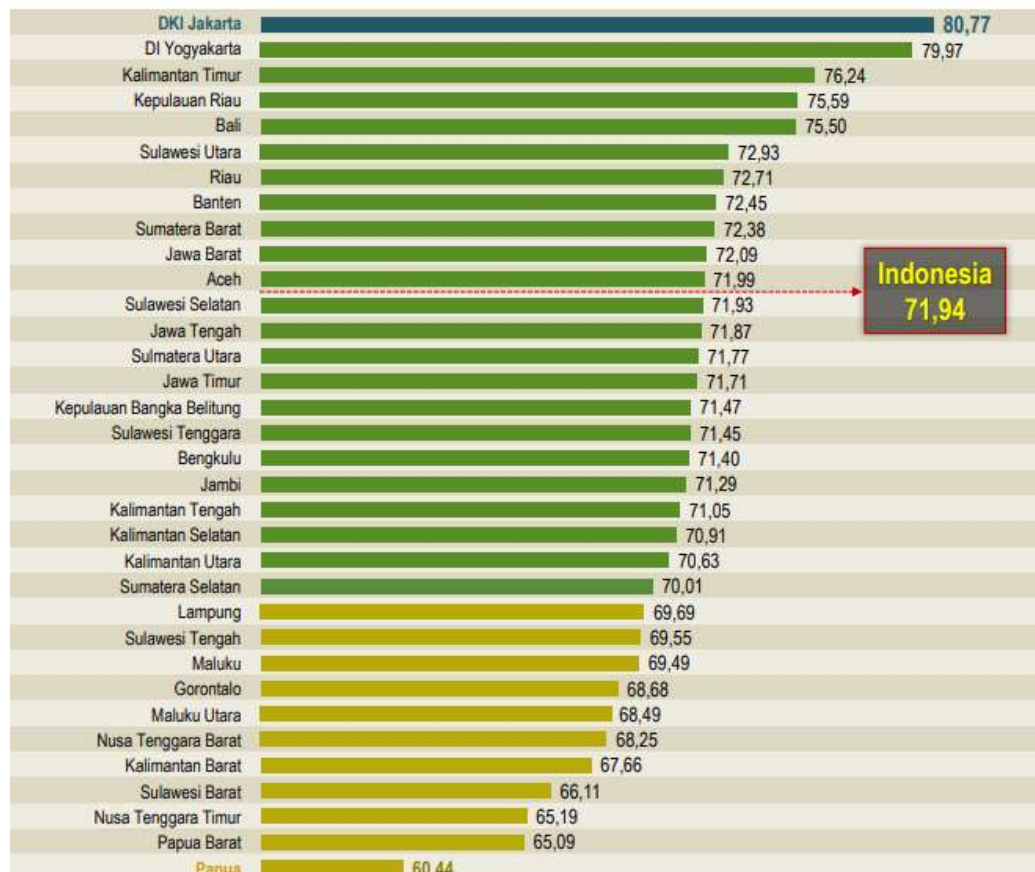


Gambar 1. 2 Simulasi Pertumbuhan Indeks Pembangunan Manusia Global

Sumber : UNDP 2020b

Pada *Human Development Report 2019*, memiliki asumsi yang menyatakan peningkatan kemampuan dan kapabilitas bagi generasi saat ini menjadi lebih *urgent* daripada sebelumnya, itu semua karena telah semakin masuknya dunia dalam era digital yang mana batas ruang dan waktu menjadi samar, sehingga penting untuk memiliki kemampuan bertumbuh yang adaptif. Prinsip utama dalam pembangunan manusia sejatinya tetaplah sama yaitu tetap kepada nilai manusia itu sendiri. Yang menjadi pembeda hanyalah pada konteksnya, dengan mempertimbangkan bahwa 1 miliar lebih orang telah bangkit dari ultra kemiskinan menjadi salah satu pencapaian yang menakjubkan bagi manusia, tapi dilain sisi juga mempertimbangkan bahwa gelombang pandemi Covid-19 memiliki kemungkinan telah memaksa kisaran 100 juta orang ke dalam area miskin yang drastis, ini menjadi dampak buruk dalam generasi ini, dan dalam pembangunan manusia telah mendapatkan pukulan telak pada tahun 2020 (gambar 1.2). Menghilangkan kemiskinan dengan beragam wujudnya, serta tetap menghilangkannya dalam kondisi dunia yang dinamis ini, akan tetap menjadi fokus utama dalam pelaksanaannya dengan tetap memiliki komitmen kebersamaan

tanpa mengabaikan siapapun dalam prosesnya, karena gerakan pembangunan manusia adalah proses berkesinambungan bukan sebagai akhir capaian. Pembangunan manusia memberikan pandangan tentang bagaimana mengidentifikasi serta menentukan kebutuhan dasar kehidupan mereka untuk bisa optimal dalam melakukan aktivitas potensial yang bisa dilakukan. Ini juga menjadikan kita melihat manusia/ orang sebagai elemen utama dalam aksi fundamental dalam menciptakan perekonomian yang berkelanjutan.



Gambar 1. 3 Indeks Pembangunan Manusia Tiap Provinsi di Indonesia 2020

Sumber : Statistik Indonesia 2020

Dari data pertumbuhan Indeks Pembangunan Manusia tersebut di peringkat terbawah dari segi poin ada Provinsi Papua berdasarkan data Badan Pusat Statistik Provinsi Papua dengan hanya memiliki poin 60.44, berbeda dengan Provinsi DKI Jakarta sebagai daerah teratas dari segi poin IPM berdasarkan data BPS 2018 memperoleh poin 80.77.

Adanya campur tangan pemerintah dalam menghadapi krisis pandemi yang berdampak pada poin Indeks Pembangunan Manusia sangat diperlukan untuk membantu akselerasi pemulihan IPM agar tidak semakin turun di priode kedepan.

Beberapa aksi yang bisa dilakukan pemerintah adalah : optimalisasi anggaran terkait sektor kesehatan & pendidikan terkini serta percepatan kembali perekonomian melalui PDRB riil . Dengan beberapa alat tersebut diharapkan mampu memicu kembali IPM sehingga Indonesia dapat kembali mengoptimalkan momentum bonus demografi beberapa tahun kedepan.

Berdasarkan beberapa deskripsi tersebut, selanjutnya dalam riset ini kita akan berfokus pada bagaimana variabel seperti PDRB (Produk Domestik Regional Bruto), belanja pemerintah dan jumlah penduduk miskin berdampak pada Indeks Pembangunan Manusia di 34 Provinsi di Indonesia, karenanya riset ini berjudul **“Pengaruh Belanja Daerah, PDRB, Jumlah Penduduk Miskin Terhadap IPM di Periode 2016-2020”**

B. Batasan Masalah

Guna memfokuskan isu pada pokok kajian riset, penulis memberi batasan zona penelitian agar tepat sasaran. Dalam riset ini hendak membahas efek dari PDRB (produk domestik regional bruto), Belanja Daerah dan Besaran Penduduk Miskin atas Indeks Pembangunan Manusia di Indonesia

C. Rumusan Masalah

Berdasarkan konteks yang telah disampaikan pada awal penyampaian, berikut rumusan masalah dari penelitian saya :

1. Bagaimana dampak PDRB ril kepada Indeks Pembangunan Manusia di Indonesia pada masa normal (2016-2019) hingga pandemi (2020)
2. Bagaimana dampak Belanja Daerah kepada Indeks Pembangunan Manusia di Indonesia pada masa normal (2016-2019) hingga pandemi (2020)
3. Bagaimana dampak Jumlah Penduduk Miskin kepada Indeks Pembangunan Manusia di Indonesia pada masa normal (2016-2019) hingga pandemi (2020)

D. Tujuan Penelitian

Berdasarkan masalah utama yang telah dipaparkan pada awal penyampaian, berikut tujuan penelitian dari penelitian ini :

1. Mengetahui besaran dampak PDRB (produk domestik regional bruto) terhadap Indeks Pembangunan Manusia pada 2016-2020
2. Mengetahui besaran dampak Belanja Daerah terhadap Indeks Pembangunan Manusia di Indonesia pada 2016-2020

3. Mengetahui besaran dampak Jumlah Penduduk Miskin terhadap Indeks Pembangunan Manusia di Indonesia pada 2016-2020
4. Untuk menganalisis pengaruh PDRB terhadap Indeks Pembangunan Manusia di Indonesia (2016-2020)
5. Untuk menganalisis pengaruh Belanja Daerah terhadap Indeks Pembangunan Manusia di Indonesia 2016-2020
6. Untuk menganalisis pengaruh Jumlah Penduduk Miskin terhadap Indeks Pembangunan Manusia di Indonesia 2016-2020

E. Manfaat Penelitian

Berdasarkan masalah utama yang telah dipaparkan pada awal penyampaian, berikut tujuan penelitian dari penelitian ini :

1. Mengetahui serta memahami besaran dampak PDRB (produk domestik regional bruto) terhadap Indeks Pembangunan Manusia pada 2016-2020
2. Mengetahui memahami besaran dampak belanja terhadap Indeks Pembangunan Manusia di Indonesia pada 2016-2020
3. Mengetahui serta memahami besaran dampak Jumlah Penduduk Miskin terhadap Indeks Pembangunan Manusia di Indonesia pada 2016-2020
5. Kegunaan hasil penelitian ini bagi publik, semoga dapat memberikan informasi, pengetahuan serta gambaran tentang Indeks Pembangunan Manusia di Indonesia.
6. Kegunaan hasil penelitian ini bagi pemerintah, semoga dapat sebagai bahan untuk pertimbangan dalam merencanakan kebijakan perihal Indeks Pembangunan Manusia.
7. Kegunaan hasil penelitian ini bagi akademis, semoga dapat menjadi informasi dan literasi materi guna penelitian selanjutnya.